

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

- i. Partisipasi dalam perencanaan Dana Kelurahan di Kelurahan Sidorejo Kidul berdasarkan tingkatan partisipasi teori Arnstein pada proses Musrenbang Kelurahan Sidorejo Kidul 2024, menunjukan tingkatan yang bervariasi. Secara keseluruhan, proses perencanaan berjalan secara partisipatif sesuai dengan konsep *bottom-up*. Proses perencanaan pembangunan secara langsung terjadi pada proses Pra-Musrenbang, tahapan tersebut masuk pada kategori partisipasi Penuh/*Citizen Power* dimana ada kolaborasi nyata antara pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pada proses Musrenbang Kelurahan, justru masuk pada klasifikasi Simbolik/*Tokenism* dikarenakan proses tersebut dapat dikatakan hanya menjadi bagian legalisasi hasil keputusan saat Pra-Musrenbang.
- ii. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif, ditemui beberapa faktor penghambat eksternal dan internal, berupa Database usulan yang tidak terakomodasi dengan baik, Gengsi OPD yang cenderung fokus pada program masing-masing, Adanya intervensi politik dalam anggaran, Antrean realisasi usulan yang cenderung lama karena keterbatasan dana, dan Kurangnya kemampuan perwakilan masyarakat dalam menginformasikan rencana pembangunan. Hambatan tersebut apabila tidak segera diatasi akan berdampak pada tingkat kualitas partisipasi masyarakat. Dalam temuan penelitian, sebagian besar hambatan sudah diatasi dan hambatan yang dirasa belum teratasi, melalui saran dalam penelitian ini

diharapkan dapat meningkatkan efektifitas partisipasi pembangunan di kelurahan.

4.2 Saran

Penelitian ini tidak luput dari kekurangan. Penelitian ini dirasa terlalu fokus pada proses formal Musrenbang, seperti diskusi dan kehadiran. Hal ini dapat mengabaikan partisipasi informal atau kontribusi masyarakat di luar forum resmi dan rasa keterwakilan masyarakat, seperti usulan yang tidak tercatat atau dinamika Pra-Musrenbang yang lebih kompleks. Selain itu, walaupun diketahui faktor eksternal mempengaruhi tingkat partisipasi seperti ketersediaan dana dari pemerintah, faktor budaya, politik dan pendidikan, pada penelitian ini tampaknya masih kurang mengeksplorasi faktor eksternal tersebut.

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian, untuk menjadikan penelitian ini lebih baik kedepannya, maka terdapat rekomendasi perbaikannya, seperti:

1. Menyertakan analisis terkait partisipasi non-formal masyarakat, seperti bagaimana mereka berkontribusi pada usulan awal atau saat melakukan advokasi di tingkat informal. Penelitian dapat melihat partisipasi informal dalam konteks percakapan warga di luar forum atau lobi informal oleh tokoh masyarakat. Untuk analisis partisipasi informal, tambahkan metode penelitian alternatif seperti observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan warga yang tidak aktif dalam forum resmi, atau melakukan survey kepuasan untuk

mengukur rasa keterwakilan tentang seberapa banyak mereka merasa didengar selama proses Musrenbang.

2. Penelitian ini juga bisa menambahkan analisis yang lebih luas dan mendalam tentang faktor-faktor sosial-ekonomi, budaya, pendidikan, pendapatan, motivasi, persepsi, status sosial, dan politik yang mempengaruhi partisipasi secara lebih signifikan. Untuk analisis faktor eksternal, pertimbangkan penggunaan data kuantitatif (misalnya, survei tentang latar belakang sosial-ekonomi) untuk melengkapi data kualitatif.

Untuk Pemerintah Kelurahan Sidorejo Kidul, melalui penelitian ini berikut saran yang dapat diberikan agar kualitas perencanaan partisipatif dapat berjalan lebih baik:

1. Pemerintah Sidorejo Kidul disarankan untuk memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan fitur interaktif pada website kelurahan. Contoh fitur yang dapat diterapkan seperti laporan warga, forum diskusi, dan layanan tanya jawab. Masyarakat dapat mengirimkan laporan secara langsung ke pemerintah kelurahan, bertanya mengenai informasi terkini, serta berpartisipasi dalam survey atau forum digital.
2. Untuk memastikan tidak ada kebutuhan masyarakat yang terlupakan, pemerintah kelurahan dapat mengadopsi metode *Analytic Hierarchy*

Process (AHP) oleh Thomas L. Saaty sebagai instrumen dalam penyusunan Daftar Skala Prioritas (DSP). Penerapan model ini akan membantu kelurahan dalam menyusun prioritas pembangunan secara objektif dan partisipatis, menghindari bias, dan memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi.

3. Untuk mengatasi hambatan terkait kurangnya kemampuan perwakilan masyarakat dalam menginformasikan rencana pembangunan, disarankan kepada pemerintah kelurahan untuk meningkatkan kapasitas perwakilan masyarakat dengan mengadakan Pelatihan Komunikasi efektif bagi ketua RT dan RW untuk membantu mereka memahami informasi rencana pembangunan secara lebih baik, serta menyediakan panduan tertulis untuk memudahkan mereka dalam menyampaikan hasil Musrenbang kepada warga.